KETERBATASAN ANGGARAN MASIH JADI PROBLEM PENDIDIKAN KALBAR

Kamis, 12 Juli 2018 - Muhammad Rhida Rachmatullah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berbagai persoalan bidang pendidikan diakui begitu kompleks, satu diantaranya keterbatasan anggaran. Kepala Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Barat, Agus Priyadi mengatakan hingga kini segi anggaran masih jadi keluhan satuan pendidikan berstatus negeri mulai jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).Â Â

Adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dinilai masih belum cukup mampu menopang operasional sekolah-sekolah.

"Dana BOS dianggap sudah cukup padahal kenyatannya tidak. Masih jauh dari harapan," ungkapnya di Kantor Ombudsman Kalbar, belum lama ini.

Ia menimpali persoalan mendasar yang jadi keluhan adalah masih banyak hal yang harus dibenahi terkait dunia pendidikan di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat.

"Karena keterbatasan dana, timbul pemikiran darimana sekolah mendapat uang untuk memenuhi segala kebutuhan operasional sekolah yang masih kurang," terangnya.

Kondisi ini mengakibatkan sekolah-sekolah harus putar otak dan mencari strategi agar operasional berlangsung di tengah kekurangan dana.

Tidak jarang kondisi ini membuat sekolah harus mengorbankan tenaga-tenaga honorer.

"Gaji honorer diturunkan oleh pihak sekolah untuk mengatasi kekurangan dana. Ini sangat bertentangan dan melanggar hak asasi. Seharusnya dinaikkan bukan malah diturunkan gajinya," imbuhnya.

Kebijakan pendidikan yang diatur oleh Pemerintah Pusat, terang Agus, membatasi gerak sekolah untuk mencari penggalangan dana.

Padahal, Undang-Undang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak hanya brsumber dari dana pemerintah saja, namun juga swasta dan masyarakat.

"Mestinya ada satu regulasi yang mengatur bagaimana caranya sekolah mencari dana sendiri. Jadi, seperti perguruan tinggi," katanya.

Namun, ia katakan bahwa kendati nantinya ada partisipasi pihak ketiga, hal itu juga dinilai masih belum mampu menyelesaikan permasalahanpendidikan.

"Kalbar bukan daerah yang memiliki banyak perusahaan tambang. Di daerah yang memiliki banyak perusahaan tambang saja tidak mampu, apalagi di Kalbar," tukasnya.

Sementara itu,Â Kepala UPT TIKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Barat,Â SukalimanÂ tidak menampik bahwa keberadaan dana BOS dan BOS DA masih belum bisa menyelesaikan masalah pendidikan di Kalbar.

"Masih banyak masalah pendidikan yang perlu dibenahi hingga kini. Tidak hanya masalah bangunan, operasional sekolah, namun juga sumber daya guru," katanya.

Â Ia mengatakan masih terjadi ketimpangan pendidikan antara di perkotaan dengan pedesaan. Khusus operasional sekolah, ia mengatakan sekolah-sekolah terkadang tertolong oleh sumbangan sukarela dari para orangtua murid yang

berlandaskan asas kesepakatan bersama.

Â Menurut dia, ada beberapa poin dalam peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak hanya bertumpu pada pemerintah dan pihak swasta, namun juga melibatkan masyarakat.

"Misalnya bantuan kepada sekolah untuk membangun lokal kelas baru karena daya tampung terbatas. Kemudian bantuan yang bersifat murni personal, seperti ada orangtua siswa yang ingin menyumbang laptop untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah," imbuhnya.

Sukaliman berharap besaran danaBOS danBOSDA terus alami kenaikan dari tahun ke tahun. Kendati dirasakan masih belum begitu cukup, pihaknya menyadari bahwa sekolah-sekolah cukup terbantu dengan tersedianyaBOS danBOSDA.

"SetidaknyaBOS danBOSDA membantu operasional lah hingga saat ini, meskipun jumlahnya dirasa belum cukup. Masih perlu banyak pembenahanpendidikan di Kalbar baik sarana dan prasarana," tukasnya. (Pra).